



LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
KECAMATAN JUWANA
TAHUN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN PATI
KECAMATAN JUWANA

Alamat : Jl. Aloon-Aloon No. 1 Juwana Telp. 0295 471003
Kode Pos 59185

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah serta berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan dukungan dari semua pihak, maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Juwana – Kabupaten Pati Tahun 2020 dapat kami selesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 ini merupakan kewajiban semua SKPD dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam menyusun LKjIP ini kami mengukur nilai efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabel berdasarkan Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Tahun 2020.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Juwana Kabupaten Pati kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Juwana, Februari 2021

The stamp is circular with a double border. The outer ring contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN PATI" at the top and "KECAMATAN JUWANA" at the bottom, separated by two small stars. The inner circle contains the text "KECAMATAN JUWANA" in the center. A signature is written across the stamp.
Drs. SUGIYONO, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19670303 199310 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Pemerintahan	1
1.2. Kepegawaian.....	6
1.3. Kondisi Geografis Daerah.....	7
1.4. Sistematika Penyajian LKjIP	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Juwana 2017 – 2022.....	18
2.2 Indikator Kinerja.....	19
2.3 Perjanjian Kinerja	21
2.4 Rencana Anggaran	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	27
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	29
3.3 Realisasi Anggaran	47
BAB IV PENUTUP	48

LAMPIRAN :

1. Perjanjian Kinerja 2020.





BAB I

PENDAHULUAN

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan harapan semua pihak, langkah untuk mewujudkan hal tersebut telah dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang diantaranya adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tersebut dinyatakan bahwa akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik .

Setiap Instansi Pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), tujuan mengimplementasikan Sistem AKIP tersebut adalah untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

1.1 PEMERINTAHAN

Secara administratif, Kecamatan Juwana terdiri dari 29 desa, 35 dukuh, 89 rukun warga, (RW) dan 371 rukun tetangga (RT). Kecamatan Juwana. Kecamatan Juwana dipimpin oleh seorang camat yang dibantu oleh sekretaris camat dan beberapa seksi serta kepala desa. Seksi-seksi tersebut terdiri dari:

1. Seksi Pemerintahan
2. Seksi Ketentraman dan Kertiban Umum
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

4. Seksi Kesejahteraan Sosial

5. Seksi Pelayanan

Kantor Kecamatan Juwana dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 64 tahun 2016 tentang tugas pokok, fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan dan Kelurahan

a) Tupoksi

1. Tugas Pokok

Organisasi Kantor Kecamatan Juwana adalah salah satu struktur organisasi perangkat daerah yang membawahi satu wilayah kerja kecamatan dan mempunyai peran yang cukup strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan disegala bidang dan pencapaian ketentraman dan ketertiban umum masyarakat .

Tugas Kecamatan sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 tahun 2016 adalah :

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- j. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Kecamatan Juwana Kabupaten Pati mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;.
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;.
- g. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- i. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- k. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Di Kabupaten Pati, berdasarkan Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati nomor 63 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, berikut disajikan kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan.

Tabel I.1.
Urusan yang Dilimpahkan Bupati Kepada Kecamatan

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
1	Aspek Rekomendasi	<ul style="list-style-type: none"> - Rekomendasi, pencatatan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan lahan bekas jalan kali mati. - Rekomendasi dan pengawasan izin pendaftaran Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang social, organisasi social/panti social, pengumpulan uang di lingkup Kecamatan. - Rekomendasi pemberian Surat Keterangan domisili kantor/

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
		<p>usaha industri.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rekomendasi pemberian ijin usaha, pengawasan dan pelaporan tempat usaha pelatihan kerja. - Rekomendasi pemberian ijin keramaian, ijin gangguan, ijin usaha dan ijin mendirikan bangunan. - Rekomendasi pencairan Alokasi Dana Desa yang diajukan oleh Pemerintah Desa di Wilayahnya. - Rekomendasi pencairan Bantuan Keuangan berupa tambahan penghasilan aparat pemerintah desa dan bantuan keuangan bagi anggota badan permusyawaratan desa dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa lainnya yang diajukan oleh pemerintah desa di wilayahnya.
2	Aspek Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai proses pelaksanaan pendaftaran di desa dan kelurahan sesuai kerja Camat. - Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai pelaporan data kependudukan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Desa dan Kelurahan sesuai wilayah kerja Camat. - Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kecamatan. - Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK skala kecamatan. - Koordinasi dan pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas) di wilayah kerjanya. - Koordinasi dan fasilitasi proses/kegiatan pengisian perangkat desa dan pemilihan kepala desa. - Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
3	Aspek Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan. - Pembinaan, pengawasan, fasilitasi Badan Permusyawaratan Desa skala Kecamatan.

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
		<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan, koordinasi, pengawasan dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kecamatan. - Pembinaan terhadap kinerja aparat pemerintahan desa baik kepala desa maupun perangkat desa termasuk staf perangkat desa.
4	Aspek Penyelenggaraan	<ul style="list-style-type: none"> - Melantik keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Legalisasi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) - Meresmikan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Memberhentikan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Menerbitkan Keputusan mengenai pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Menerbitkan Keputusan mengenai pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dan pengesahan anggota Badan Permusyawaratan Desa antar waktu desa di wilayah kerjanya. - Evaluasi Peraturan Desa tentang APBDes. - Pembentukan satuan relawan kebakaran (Satlakar) di tiap Kecamatan. - Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa ijin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup. - Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah Negara, bebas dan tanah timbul di wilayah kerjanya. - Pendataan ketenagakerjaan di wilayah kerjanya. - Pengusulan penetapan nama-nama geografi.

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
		<ul style="list-style-type: none"> - Pengusulan penetapan batas wilayah Kecamatan dan batas wilayah antar kelurahan. - Pelaksanaan lomba desa/kelurahan tingkat kecamatan. - Koordinator pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pembinaan administrasi pungutan PBB pedesaan dan perkotaan. - Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. - Pemungutan Pajak Daerah di luar surat ketetapan Pajak daerah (SKPD).

Tabel I.2.
Kewenangan Program dan Kegiatan PD yang Dilimpahkan Kepada Kecamatan

No	Urusan dan PD yang melimpahkan	Program dan Kegiatan yang dilimpahkan
1	Dinas Koperasi dan UMKM	Pelaksanaan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Perizinan IMB, SIUP bagi usaha mikro, TDP bagi usaha mikro, Pengumpulan Dana dan penutupan jalan.
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pembuatan KTP, KK, Surat Pindah, Surat Keterangan pengganti KTP.

1.2 KEPEGAWAIAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Juwana didukung oleh Sumber Daya Manusia berjumlah 26 orang sebagai berikut :

Tabel I.3
Sumber Daya Kecamatan Juwana

No	Jab. Struktural/ Jab. Fungsional	Jml	Pangkat/ Gol. Ruang	Jml	Pend Terakhir	Jml
1	2	3	4	5	6	7

1	Camat	1	Pembina Tk. I / IV b	1	S.2	1
2	Sekretaris Camat	1	Penata/ III c	1	S2	1
3	Kepala Seksi	5	Penata Tk. I/ III-d	4	S.1	4
			Penata Muda Tk. I/ III-b	1	S2	1
4	Kepala Sub Bagian	2	Penata / III c	1	S.1	1
			Penata Muda /III a	1	S1	1
5	Staf	4	Penata Muda Tk. I / III b	1	S1	1
			Penata Muda / III a	1	SLTA	1
			Pengatur / II c	1	S1	1
			Pengatur Muda / II a	1	SLTP	1
6	Sekdes	13	Pengatur Tk. I /II d	6	SLTA	6
			Pengatur /II c	1	S1	1
				1	D3	1
				5	SLTA	6

1.3 KONDISI GEOGRAFIS DAERAH

1.3.1 BATAS ADMINISTRASI

Kecamatan Juwana merupakan salah satu kecamatan yang terletak 12 km ke arah timur Ibukota Kabupaten Pati.yang berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Laut Jawa

Sebelah Timur ; Kecamatan Batangan

Sebelah Selatan : Kecamatan Jakenan

Sebelah Barat : Kecamatan Wedarijaksa dan Kecamatan Pati.

1.3.2 LUAS WILAYAH

Luas wilayah Kecamatan Juwana adalah 5.592,598 Ha yang terdiri dari 1.164,622 Ha lahan sawah dan 1.661 Ha lahan bukan sawah serta 4.427,976 Ha lahan bukan pertanian.

1.3.3 TOPOGRAFI DAN MORFOLOGI

Ketinggian daerah Kecamatan Juwana diatas permukaan laut tertinggi adalah 3 m, terendah 1 mdan rata-rata terletak pada ketinggian 2 m.

1.3.4 IKLIM

Tipe iklim dari Kecamatan Juwana adalah E1. Tahun 2016, Kecamatan Juwana tercatat memiliki 101 hari hujan dengan curah hujan tertinggi 452 mmpada Bulan Januari dan curah hujan terendah 0 mmpaa Bulan Juli, Agustus, dan September, sedangkan suhu tertinggi pada tahun 2016 adalah 26⁰Cdan suhu terendahnya adalah 24⁰C.

1.4. Kinerja Pelayanan Kecamatan

1.4.1. Kinerja Pelayanan

Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 221 dan pasal 226, serta Peraturan Pemerintan nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 50 menyebutkan bahwa Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan: koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pati, yang menjadi batasan area pengukuran kinerja pelayanan kecamatan. Kewenangan kecamatan juga ditambahkan berdasarkan Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati nomor 63 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati. Dengan demikian kinerja pelayanan Kecamatan Juwana didasarkan pada tugas dan fungsi dan pelimpahan kewenangan tersebut.

A. Mewujudkan masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah Kecamatan

1. Angka Kriminalitas

Salah satu tugas kecamatan yaitu mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum. Terkait dengan angka kriminalitas yang terjadi di Kecamatan Juwana dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel I.4
Angka Kriminalitas di Kecamatan Juwana

No	Jenis Kriminal	2013	2014	2015	2016	2017
	Jumlah kasus narkoba	na	0	0	0	0
	Jumlah kasus pembunuhan	na	0	0	0	0
	Jumlah kejahatan seksual	na	0	0	0	0
	Jumlah kasus penganiayaan	na	14	14	5	5
No	Jenis Kriminal	2013	2014	2015	2016	2017
	Jumlah kasus pencurian	na	40	29	27	20
	Jumlah kasus penipuan	na	4	6	4	4
	Jumlah kasus pemalsuan uang	na	0	0	0	0
	Jumlah tindak kriminal selama 1 tahun	na	58	49	36	29
	Jumlah penduduk	na	93.876	92.992	95.597	95.597
	Angka kriminalitas (8)/(9)	na	6.18	5,27	3,76	3,03

(Rumus Angka Kriminalitas: jumlah tindak criminal selama setahun dibagi jumlah penduduk dikalikan 10.000)

2. Posko Keamanan Lingkungan (Poskamling).

Terkait dengan ketersediaan Posko Keamanan Lingkungan

(Poskamling) di Kecamatan Juwana dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel I.5
Data Poskamling di Kecamatan Juwana

No	Desa	Poskamling		
		Aktif	Tidak Aktif	Jumlah
1	Sejomulyo	5	0	5
2	Bringin			0
3	Ketip			0
4	Pekuwon	2		2
5	Karang		3	3
6	Karangrejo		20	20
7	Bumirejo		2	2
8	Kedungpancing		3	3
9	Jepuro	1	1	2
10	Tluwah	2	3	5
11	Doropayung	2	3	5
12	Mintomulyo		1	1
13	Gadingrejo	2		2
14	Margomulyo	3		3
15	Langgenharjo		4	4
16	Genengmulyo	3	3	6
17	Agungmulyo	2	3	5
18	Bakaran Kulon		6	6
19	Bakaran Wetan		1	1
20	Dukutalit			0
21	Growong Kidul		3	3
22	Growong Lor	10	11	21
23	Kauman		3	3
24	Pajeksan		3	3
25	Kudukeras			4
26	Kebonsawahan	6		6
27	Bajomulyo	2	5	7
28	Bendar			0

29	Trimulyo	4	8	12
	Jumlah	44	86	130

3. Perlindungan Masyarakat (Linmas).

Terkait dengan keberadaan anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kecamatan Juwana dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel I.6
Data Anggota Linmas di Kecamatan Juwana

No	Desa	Linmas		
		Aktif	Tidak Aktif	Jumlah
1	Sejomulyo	18		18
2	Bringin	10		10
3	Ketip	16		16
4	Pekuwon	14		14
5	Karang	21		21
6	Karangrejo	22		22
7	Bumirejo	15		15
8	Kedungpancing	7	3	10
9	Jepuro	5		5
10	Tluwah	6		6
11	Doropayung	21		21
12	Mintomulyo	11		11
13	Gadingrejo	22		22
14	Margomulyo	18		18
15	Langgenharjo	22		22
16	Genengmulyo	13		13
17	Agungmulyo	20		20
18	Bakaran Kulon	20		20
19	Bakaran Wetan	31		31
20	Dukutalit	20		20
21	Growongf Kidul	26		26
22	Growong Lor	34		34
23	Kauman	20		20
24	Pajeksan	10		10

25	Kudukeras	15	5	20
26	Kebonsawahan	4		4
27	Bajomulyo	28		28
28	Bendar	19		19
29	Trimulyo	32		32
	Jumlah	520	8	528

1.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan

Tantangan pengembangan pelayanan kecamatan Juwana merujuk pada tugas fungsi utama kecamatan yaitu koordinasi (i) penyelenggaraan pemerintahan, (ii) pelayanan publik, dan (iii) pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Juwana kurun 2012-2017, maka tantangan pengembangan ke arah lima tahun yang akan datang (2017-2022) seagai berikut.

1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban.

Tantangan dalam memberikan rasa aman dalam hal ini menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui pengembangan keikutsertaan masyarakat dalam menjaga lingkungannya. Keberadaan lembaga posko keamanan lingkungan (Poskamling) yang selama ini sudah ada memerlukan upaya untuk mengembalikan peran dan fungsinya untuk ikut serta dalam menjaga ketentraman dan ketertiban. Selain itu keberadaan tenaga perlindungan masyarakat (Linmas) dapat dimanfaatkan untuk ikut serta dalam menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan.

2. Koordinasi bidang fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan

Tantangan ke depan adalah implementasi teknologi informasi untuk penyelenggaraan pemerintahan di era keterbukaan informasi, maka tantangan pengembangannya adalah bagaimana kecamatan menguatkan fasilitasi dan koordinasi lintas pelaku untuk menyediakan data sektoral kewilayahan yang akurat dan terbaru.

Peluang pengembangan ke depan perlu diprioritaskan optimalisasi pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat. Oleh karena itu tantangan sekaligus peluang pengembangannya adalah peningkatan kualifikasi sumber daya aparatur kecamatan.

3. Pelayanan Publik

Tantangan pembangunan nasional dalam RPJMN dimana seluruh daerah di Indonesia diprograman bergerak ke arah Smart City memberi tantangan khusus bagi kecamatan untuk menyelenggarakan pelayanan publik berbasis teknologi informasi menuju smart kecamatan (Kecamatan cerdas). Fokus pengembangan pelayanan kurun lima tahun ke depan adalah menuju kecamatan berstandar ISO untuk pelayanan publik.

4. Pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan

Tantangan dari RPJMN 2014-2019 adalah bagaimana menguatkan partisipasi masyarakat menuju tata kelola pemerintahan yang demokratis dan menguatkan kemandirian wilayah. Tantangan pengembangan layanan kecamatan kurun 2017-2022 lebih memerlukan fokus pengembangan dalam hal isu:

- a. Partisipasi masyarakat untuk menjaga pengendalian kualitas dan kuantitas sumber lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kegiatan rumah tangga dan kegiatan usaha.
- b. Partisipasi masyarakat untuk memenuhi rasio kebutuhan sarana sanitasi lingkungan untuk mengurangi resiko dampak kesehatan dikarenakan lingkungan pemukiman yang tidak sehat.

1.6. Permasalahan dan isu-isu strategis

Dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Juwana dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dijumpai antara lain:

1. Ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat.

Dalam hal penegakan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat diidentifikasi permasalahan yaitu:

- a) Masih tingginya Angka Kriminalitas di wilayah kecamatan;
- b) Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c) Rendahnya tingkat keaktifan linmas/hansip.

2. Pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan.

Dalam hal pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan diidentifikasi permasalahan yaitu:

- a) Masih rendah lembaga kemasyarakatan yang berprestasi;
- b) Masih rendahnya tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di desa;
- c) Belum optimalnya bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat;

- d) Belum optimalnya ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan;
 - e) Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk dalam APBD Kabupaten;
 - f) Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten.
3. Tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN.
- Dalam hal tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN diidentifikasi permasalahan yaitu:
- a) Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat;
 - b) Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu;
 - c) Belum optimalnya pelayanan perijinan tepat waktu;
 - d) Belum maksimalnya tingkat capaian keterisian data monografi dan profil kecamatan;
 - e) Belum optimalnya Realisasi Capaian RKPDes;
 - f) Belum semua desa yang administrasi pengelolaan keuangannya baik.

Untuk lebih jelasnya mengenai identifikasi permasalahan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel I.7
PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat	Masih tingginya Angka Kriminalitas di wilayah kecamatan	Rasio Poskamling dan anggota Linmas yang belum sesuai
		Masih rendahnya tingkat poskamling dan Linmas aktif	
2	Pemberdayaan dan penguatan	Masih rendah lembaga	Belum aktifnya lembaga kemasyarakatan (LPMD, PKK,

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
	kelompok rentan	kemasyarakatan yang berprestasi dan aktif di desa	RT/RW, Karang Taruna, Posyandu) di desa
		Belum optimalnya bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat	Belum optimalnya penyaluran rastra, PKH, bantuan keagamaan kepada masyarakat desa
		Belum optimalnya ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.	
		Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk dalam APBD dan Musrenbang Kabupaten	Masih rendahnya tingkat kehadiran masyarakat dalam Musrenbang desa dan kecamatan
3	Tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN	Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat	Belum optimalnya pelayanan perijinan dan administrasi kependudukan yang terlayani
		Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan perijinan tepat waktu	
		Belum maksimalnya tingkat capaian keterisian data monografi dan profil kecamatan	Belum maksimalnya tingkat keterisian data monografi dan profil kecamatan
		Belum optimalnya Realisasi Capaian	Belum optimalnya laporan keuangan desa yang tepat

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
		RKPDdes	waktu dan sesuai standar pelaporan
		Belum semua desa yang administrasi pengelolaan keuangannya baik	

Berdasar identifikasi permasalahan di atas maka tantangan isu strategis yang dihadapi dari tugas dan fungsi pelayanan kecamatan sebagai berikut.

1. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dengan penguatan keikutsertaan masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar;
2. Isu Reformasi pelayanan publik di kecamatan (pelayanan perizinan, pelayanan kependudukan) dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional dan akuntabel;
3. Penguatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.4 SISTEMATIKA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Kantor Kecamatan Juwana 2020 mengacu pada peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Kecamatan Juwana Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN;

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategi issue) yang sedang dihadapi organisasi

BAB II : PERENCAAN KINERJA;

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2020.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi serta analisis capaian kinerja.:

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bag ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV : PENUTUP.

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN : 1) Penetapan Kinerja Tahun 2020

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Sesuai tugas pokok dan fungsinya Kantor Kecamatan Juwana sebagai institusi dibidang perencanaan sesuai UU 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah menyusun rencana stratejik yang merupakan implementasi RPJMD Kabupaten Pati tahun 2017–2022 berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2017–2022 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana stratejik Kantor Kecamatan Juwana yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan uraian sasaran target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2019 berikut program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2020.

2.1. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Juwana 2017 – 2022

Pernyataan Visi menggambarkan masa depan yang diinginkan organisasi yang menerangkan kondisi dan kualitas organisasi tersebut (Popovich : 1999). Visi dapat diartikan sebagai artikulasi dari cita-cita, nilai, arah dan tujuan yang akan memandu masa depan organisasi (Werren Bennis dan Michael Mische : 1995). Terkait dengan definisi ini, maka merumuskan visi harus mengandung suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh organisasi .

Visi Kantor Kecamatan Juwana – Kabupaten Pati dalam tahun 2017 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Pati tahun 2017 – 2022 yakni Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik..

Misi merupakan pernyataan tentang tujuan organisasi yang diwujudkan dalam produk dan pelayanan, kebutuhan yang dapat ditanggulangi kelompok masyarakat, nilai yang dapat diperoleh, serta aspirasi dan cita-cita dimasa mendatang .

Misi Kantor Kecamatan Juwana – Kabupaten Pati adalah :

1. Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan local;
2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan;
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis, dan mengutamakan pelayanan publik.

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Kantor Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, perlu ditetapkan tujuan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan yang akan dicapai dalam lima tahun kedepan dijabarkan sebagai berikut :

1. Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah Kecamatan; dengan sasaran : meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban
2. Meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui upaya pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan Juwana; dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan;
 - b. Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat;
 - c. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
3. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan mengedepankan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah kecamatan;

Berdasarkan atas tujuan, selanjutnya Kecamatan Juwana menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran strategis sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban;
2. Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan;
3. Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat;
4. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan;
5. Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan dan administrasi kependudukan di kecamatan;
6. Terrpenuhiya kebutuhan data untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
7. Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa.

2.2 INDIKATOR KINERJA

Sebagian besar indikator yang digunakan dalam pelaporan ini diambil dari indikator kinerja daerah yang tertera dalam RPJMD 2017- 2022 beserta dengan proyeksi target tahun 2020 dan target akhir RPJMD 2022, yang dikelompokkan dalam aspek dan fokus Pembangunan Daerah Kabupaten Pati.

Didalam mengukur kinerja Kecamatan Juwana Tahun 2020 dipergunakan 15 indikator kinerja utama dari 10 sasaran. Indikator Kinerja Utama (IKU) dipilih dari indikator kinerja daerah yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses pengelolaan pemerintah daerah yang keluarannya berupa hasil (outcome).

Perincian penggunaan 15 indikator kinerja dari 10 sasaran sesuai dengan Prioritas Pembangunan Daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD 2020 Kecamatan Juwana adalah sebagai berikut:

TABEL 2.1
SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA DAN TARGET
KECAMATAN JUWANA
TAHUN 2020

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah Kecamatan	Angka Kriminalitas	3
2.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	Persentase pos kamling aktif	37%
3.		Persentase anggota linmas aktif	98%
4.	Meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui upaya pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berprestasi	47%
5.		Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat	100%
6.		Persentase usulan masyarakat yang masuk dalam APBD Kabupaten	9%
7.	Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	73%

8.	Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat	Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.	100%
9.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persentase usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten	46%
10	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan mengedepankan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan	3,3
11.		Persentase Realisasi Capaian RKPDes	100%
12	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan dan administrasi kependudukan di kecamatan	Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	100%
13		Persentase pelayanan perijinan tepat waktu	100%
14	Terpenuhinya kebutuhan data untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan	85%
15	Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa	Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib	87%

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Rencana Kerja Kecamatan Juwana tahun 2020 mengalami proses pembahasan dalam menentukan APBD Kecamatan Juwana yang memuat program dan kegiatan yang disetujui untuk dilaksanakan pada tahun 2020.

Kecamatan Juwana akan melaksanakan APBD untuk mewujudkan komitmen yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja 2020 (Lampiran I), Kecamatan Juwana berjanji akan mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan hingga pada gilirannya mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2017-2022 Kecamatan Juwana.

Sasaran Pertama Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah Kecamatan, diukur dengan 1 (satu) indikator dengan target pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Target Kinerja Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah Kecamatan

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Angka kriminalitas	3

Untuk mencapai sasaran ini didukung oleh 1 program kegiatan yaitu Program Pemeliharaan Kantrantibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal.

Selanjutnya **sasaran Kedua** Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban, diukur dengan 2 (dua) indikator dengan target yang hendak dicapai pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3

Target Kinerja Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Persentase pos kamling aktif	37%
2.	Persentase anggota linmas aktif	98%

Untuk mencapai sasaran ini didukung oleh 1 (satu) program kegiatan yaitu Program Pemeliharaan Kantrantibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal .

Sasaran Ketiga Meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui upaya pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan, diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja dengan target yang hendak dicapai pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4

Target Kinerja Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Melalui Upaya Pembinaan Kemasyarakatan Di Wilayah Kecamatan

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berprestasi	47%

2.	Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat	100%
3.	Persentase usulan masyarakat yang masuk dalam APBD Kabupaten	9%

Untuk mencapai sasaran ini didukung oleh 2 (dua) program kegiatan yaitu Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dan Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

Sasaran Keempat Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan, diukur dengan 1 indikator kinerja dengan target yang hendak dicapai pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5

Target Kinerja Meningkatnya Peran Serta Lembaga Kemasyarakatan Dalam Pembangunan

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	73%

Untuk mencapai sasaran ini didukung oleh 1 (satu) program kegiatan yaitu Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.

Sasaran Kelima Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja dengan target pada tahun 2020 yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6

Target Kinerja Terlaksananya Penyaluran Bantuan Kepada Masyarakat

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.	100

Untuk mencapai sasaran ini untuk tahun 2020 didukung oleh 1 (satu) program kegiatan yaitu Program Penanggulangan Kemiskinan .Masyarakat Desa.

Sasaran Keenam Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja dengan target yang hendak dicapai pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7
Target Kinerja Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Persentase usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten	46%

Untuk mencapai sasaran ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu program perencanaan pembangunan daerah.

Sasaran Ketujuh Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan mengedepankan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah kecamatan, diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja dengan target yang hendak dicapai pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8
Target Kinerja Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih dan Akuntabel Dengan Mengedepankan Pelayanan Langsung Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan	3,3
2.	Persentase Realisasi Capaian RKPDes	100%

Untuk mencapai sasaran ini didukung oleh 4 (empat) program kegiatan yaitu Program Penataan Administrasi Kependudukan, Program Peningkatan Kualitas Pelayanan perijinan dan pelayanan Publik, Program Pengembangan Data/Informasi dan Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa.

Sasaran Kedelapan Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan dan administrasi kependudukan di kecamatan, diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja dengan target yang hendak dicapai pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9

Target Kinerja Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan dan administrasi kependudukan di kecamatan

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	100%
2.	Persentase pelayanan perijinan tepat waktu	100%

Untuk mencapai sasaran ini didukung oleh 2 (dua) program kegiatan yaitu Program Peningkatan Kualitas Pelayanan perijinan dan pelayanan Publik dan Program Penataan Administrasi Kependudukan.

Sasaran Kesembilan Terpenuhinya kebutuhan data untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja dengan target yang hendak dicapai pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10

Target Kinerja Terpenuhinya Kebutuhan Data Untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan	85%

Untuk mencapai sasaran ini didukung oleh 1 (satu) program kegiatan yaitu Program Pengembangan Data/Informasi.

Sasaran Kesepuluh Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa, diukur dengan 1(satu) indikator kinerja dengan target yang hendak dicapai pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10

Target Kinerja Terwujudnya Tertib Administrasi Pelaporan Keuangan Desa

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib	87%

Untuk mencapai sasaran ini didukung oleh 1 (satu) program kegiatan yaitu Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa.

2.4. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2020

Sebagaimana yang telah dituangkan dalam dokumen kebijakan umum APBD tahun 2020, belanja daerah diprioritaskan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintah dan pelayanan dasar yang sesuai dengan kewenangannya, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Mengingat kondisi kemampuan keuangan daerah yang sangat terbatas, belanja daerah Tahun 2020 sebesar Rp. 3.643.853.000,- terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.821.739.000,- (atau sebesar 77,44 % dari total anggaran) dan Belanja langsung sebesar Rp. 822.114.000,- (atau sebesar 22,56 % dari total anggaran)

Tabel 2.11
Target belanja daerah

Uraian	Target Rp	%
Belanja Tidak Langsung	2.821.739.000	77,44
Belanja Langsung	822.114.000	22,56
Total Belanja	3.643.853.000	100

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program – program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran – sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 2.13
Alokasi Anggaran per Sasaran Pembangunan Tahun 2020

NO	SASARAN	ANGGARAN	PROSENTASE ANGGARAN (%)
1	Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah Kecamatan	34.875.000	15%
2	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban		
3	Meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui upaya pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan	99.266.400	44%
4	Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan		
5	Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat	-	-
6..	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan		
7.	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan mengedepankan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah kecamatan	91.362.800	41%
8.	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan dan administrasi kependudukan di kecamatan		
9..	Terpenuhinya kebutuhan data untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan		
10.	Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa		

Bab III

Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Juwana – Kabupaten Pati adalah perwujudan kewajiban Kecamatan Juwana untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kantor Kecamatan Juwana - Kabupaten tahun 2020 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja Organisasi adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah.

Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap Capaian kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan melakukan pengukuran pada indikator-indikator sesuai sasaran yang dituju, didasarkan pada target yang dimuat dalam Perjanjian Kinerja (PK), untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan dasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteia Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51 % ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri No. 54 Tahun 2010

Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.1 selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Kecamatan Juwana tahun 2020. Secara rinci pengukuran capaian kinerja / sasaran masing-masing indikator kinerja Kecamatan Juwana tahun 2020 tergambar dalam tabel sebagai berikut :

TABEL 3.2
CAPAIAN KINERJA
KECAMATAN JUWANA

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROSENTASE
1.	Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah Kecamatan	Angka Kriminalitas	3	2,61	87%

2.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	Persentase pos kamling aktif	37%	36,92%	99,78%
3.		Persentase anggota linmas aktif	98%	98,48%	100%
4.	Meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui upaya pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berprestasi	47%	47%	100%
5.		Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat	100%	100%	100%
6.		Persentase usulan masyarakat yang masuk dalam APBD Kabupaten	9%	0%	0%
7.	Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	73%	71%	97%
8.	Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat	Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.	100%	100%	100%
9.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persentase usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten	46%	53,84%	117%
10.	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan mengedepankan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan	3,3	3,24	98,18%
11.		Persentase Realisasi Capaian RKPDes	100%	100%	100%
12.	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan dan administrasi kependudukan di kecamatan	Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	100%	100%	100%
13.		Persentase pelayanan perijinan	100%	100%	100%

		tepat waktu			
14.	Terpenuhinya kebutuhan data untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan	85%	72,5%	85%
15.	Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa	Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib	87%	86%	99%

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

3.2.1 Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah Kecamatan.

Kecamatan Juwana berupaya mewujudkan masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah Kecamatan. Keberhasilan pencapaian tujuan strategis ini diukur dengan menggunakan 1(satu) indikator kinerja yaitu angka kriminalitas.

Uraian Kinerja

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Angka kriminalitas

INDIKATOR KINERJA	T	R	CAPAIAN
Angka kriminalitas	3	2,61	87

Uraian Kinerja

Angka kriminalitas. Angka ini diperoleh dari 4 variabel yaitu jumlah kasus penipuan, jumlah kasus penganiayaan, jumlah kasus pencurian, jumlah kasus KDRT. Jumlah kasus penipuan sebanyak 1 kasus, kasus penganiayaan sebanyak 5 kasus, kasus pencurian sebanyak 18 kasus dan kasus KDRT sebanyak 1 kasus. Angka kriminalitas dihitung dengan cara membandingkan jumlah tindak kriminal yang tertangani dalam satu tahun dibandingkan jumlah penduduk kali 10.000. Jumlah tindak kriminal yang tertangani selama tahun 2020 di Kecamatan Juwana sebanyak 25 kasus, sedangkan jumlah penduduk sejumlah 95.597 orang. Pada tahun 2020 angka kriminalitas kecamatan Juwana sebesar 2,16.

Evaluasi dan Analisis Kinerja

Tabel 3.4
Perbandingan Data Angka Kriminalitas

INDIKATOR KINERJA	2017	2018	2019	2020
Angka kriminalitas	5	1,39	1,39	2,16

Berdasarkan kondisi tahun 2017, angka kriminalitas 5 pada tahun 2018 sebesar 1,39, pada tahun 2019 sebesar 1,39 sedangkan pada tahun 2020 ini target yang ditetapkan sebesar 3 terealisasi 2,16. Capaian kinerja sasaran tahun 2020 tergolong masih tinggi dengan capaian indikatornya sebesar 87%. Walaupun capaian indikatornya termasuk tinggi, namun masih dibawah target.

Jika dibandingkan dengan tahun 2019 dan tahun-tahun sebelumnya maka angka kriminalitas tahun 2020 mengalami kenaikan lagi. Naiknya angka kriminalitas yang terjadi di Kecamatan disebabkan masa-masa pandemi perekonomian sulit sehingga tindak kejahatan naik.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang sebesar 2% maka capaian kinerja tahun 2020 belum mencapai target jangka menengah yang telah ditentukan, sehingga masih perlu dilakukan tindakan pengawasan, monitoring, peningkatan fungsi linmas dan poskamling di desa- desa agar kondisi wilayah Kecamatan Juwana aman dan tertib.

2.3.1 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban

Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban tercermin pada 2 (dua) capaian indikator kinerja yaitu persentase pos kamling aktif, dan persentase anggota linmas aktif.

Tabel. 3.5

Capaian Kinerja Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban

INDIKATOR KINERJA	T	R	CAPAIAN
Persentase pos kamling aktif	37%	36,92%	99,78%
Persentase anggota linmas aktif	98%	98,48%	100%

Uraian Kinerja

Capaian indikator persentase pos kamling aktif pada tahun 2020 sebesar 36,92%. Indikator persentase pos kamling aktif dihitung dari jumlah pos kamling aktif dibagi dengan jumlah pos kamling yang ada. Untuk tahun 2020 dari 29 desa jumlah pos kamling yang aktif sebesar 48 dari jumlah pos kamling yang ada sebanyak 130 poskamling. Jadi kalau diprosentase maka capaian indikator kinerja sebesar 36,92%.dari yang ditargetkan sebesar 100%. Capaian indikator kinerja ini kurang sedikit dari target yang telah ditetapkan karena jumlah pos kamling yang aktif di Kecamatan Juwana selama tahun 2020 tidak ada penambahan. Ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya pos kamling untuk menjaga keamanan lingkungan masih perlu ditingkatkan.

Capaian indikator persentase anggota linmas aktif pada tahun 2020 sebesar 98,48%. Indikator persentase anggota linmas aktif dihitung dari jumlah anggota linmas aktif dibagi dengan jumlah anggota linmas yang ada. Untuk tahun 2020 dari 29 desa jumlah anggota linmas yang aktif sebesar 520 dari jumlah anggota linmas yang ada sebanyak 528. Jadi kalau diprosentase maka capaian indikator kinerja sebesar 98,48% dari yang ditargetkan sebesar 98%. Capaian indikator kinerja ini lebih tinggi sedikit dari target yang telah ditetapkan karena adanya peningkatan jumlah anggota linmas yang aktif.

Evaluasi dan Analisis Kinerja

Tabel 3.6

Perbandingan Data Persentase pos kamling aktif dan Persentase anggota linmas aktif

INDIKATOR KINERJA	2017	2018	2019	2020
Persentase pos kamling aktif	34	35,38	36,92	36,92
Persentase anggota linmas aktif	98	98,48	98,48	98,48

Berdasarkan kondisi tahun 2017 sampai dengan 2019 Persentase pos kamling aktif 34%,35,38% , 36,92% sedangkan pada tahun 2020 ini target yang ditetapkan sebesar 37% terealisasi 36,92%. Capaian kinerja sasaran tahun 2020 sangat tinggi dengan capaian indikatornya sebesar 99,78%. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maka capaian kinerja sasaran mengalami kenaikan terus.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang direncanakan sebesar 39%, maka capaian kinerja sasaran persentase pos kamling aktif tahun

2020 masih perlu ditingkatkan. Langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk mencapai kondisi seperti target jangka menengah adalah pembinaan kepada aparat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pos kamling.

Untuk persentase anggota linmas aktif kondisi pada tahun 2017 98%, 2018 sebesar 98,48%, 2019 sebesar 98,48% sedangkan pada tahun 2020 target yang ditetapkan sebesar 98% terealisasi 98,48%. Capaian indikator untuk tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 sama, karena tidak ada penambahan jumlah anggota linmas aktif.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang sebesar 98%, maka capaian kinerja sasaran tahun 2020 ini sudah mencapai target yang telah ditetapkan dalam jangka menengah. Walaupun begitu kita tetap perlu mempertahankan capaian kinerja sasaran ini agar tidak mengalami penurunan.

Untuk mencapai tujuan terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah Kecamatan dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban ditunjang oleh 1 program yaitu Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal dengan anggaran Rp.34.875.000,- atau 15% dari anggaran langsung untuk mendukung program prioritas dan terealisasi sebesar Rp.28,068.000,-

Perlu diketahui bahwa pada tahun 2020 ada refocusing anggaran untuk mendukung kegiatan penanggulangan covid-19 sehingga berakibat berkurangnya anggaran. Akibat refocusing, anggaran yang mendukung Program pemeliharaan kantrantibnas dan pencegahan tindak kriminal berkurang menjadi Rp.28.078.000,-

Dengan capaian kinerja 87% - 100%, penggunaan anggaran dalam rangka Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah Kecamatan dinilai efisien karena dari anggaran Rp. 28.078.000,- terealisasi Rp. 28,068.000,- atau terserap 99,96%, efisiensi sebesar Rp.10.000,-

3.2.3. Meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui upaya pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan.

Peningkatan keberdayaan masyarakat melalui upaya pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan tercermin pada 3 (tiga) capaian indikator kinerja yaitu Persentase lembaga kemasyarakatan yang berprestasi, Persentase

bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat dan Persentase usulan masyarakat yang masuk dalam APBD Kabupaten.

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui upaya pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan

INDIKATOR KINERJA	T	R	CAPAIAN
Persentase lembaga kemasyarakatan yang berprestasi	47%	47%	100%
Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat	100%	100%	100%
Persentase usulan masyarakat yang masuk dalam APBD Kabupaten	9%	0%	0%

Uraian Kinerja

Capaian indikator lembaga kemasyarakatan yang berprestasi pada tahun 2020 sebesar 47%. Indikator lembaga kemasyarakatan yang berprestasi dihitung dari jumlah lembaga kemasyarakatan yang berprestasi dibagi dengan jumlah lembaga kemasyarakatan yang ada. Untuk tahun 2020 dari 29 desa jumlah lembaga kemasyarakatan yang berprestasi sebesar 271 dari jumlah lembaga kemasyarakatan yang ada sebanyak 576. Jadi kalau diprosentase maka capaian indikator kinerja sebesar 47% dari yang ditargetkan sebesar 47%. Capaian indikator kinerja ini masuk kategori sangat tinggi yaitu 100 % sesuai target yang telah ditetapkan.

Capaian indikator persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat pada tahun 2020 sebesar 100%. Indikator persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat pada tahun 2020 dihitung dari jumlah bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat dibagi dengan jumlah bantuan sosial keseluruhan. Untuk tahun 2020 bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat secara keseluruhan sebesar Rp.7.584.675.000,- yang terdiri dari bantuan BPNT sebesar Rp.5.761.200.000,- bantuan PKH sebesar Rp.1.537.725.000,- dan bantuan keagamaan sebesar Rp.285.750.000,-. Jumlah bantuan sosial ini tersalur seluruhnya kepada kemasyarakatan. Untuk tahun 2020.

Capaian indikator persentase usulan masyarakat yang masuk dalam APBD Kabupaten pada tahun 2020 sebesar 0%. Indikator persentase usulan masyarakat yang masuk dalam APBD Kabupaten dihitung dari jumlah usulan yang terealisasi di dalam APBD dibagi dengan jumlah usulan musrenbang yang terakomodir di dalam RKPD kali 100%. Untuk tahun 2020 jumlah usulan masyarakat yang masuk dalam APBD Kabupaten sejumlah 11 usulan dari jumlah usulan musrenbang yang terakomodir di dalam RKPD sebanyak 21. Jadi kalau diprosentase maka capaian indikator kinerja sebesar 0% dari yang ditargetkan sebesar 9%. Capaian indikator kinerja ini masuk kategori sangat rendah dari target yang telah ditetapkan. Capaian indikator kinerja tahun 2020 tidak tercapai karena akibat dari kebijakan refofusing anggaran sehingga usulan musrenbang yang seharusnya masuk di APBD Kabupaten dibatalkan.

Evaluasi dan Analisis Kinerja

Tabel 3.8

Perbandingan Data Persentase lembaga kemasyarakatan yang berprestasi, Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat dan Persentase usulan masyarakat yang masuk dalam APBD Kabupaten

INDIKATOR KINERJA	2017	2018	2019	2020
Persentase lembaga kemasyarakatan yang berprestasi	40	45	46	47
Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat	-	-	100	100
Persentase usulan masyarakat yang masuk dalam APBD Kabupaten	6	7	20	0

Berdasarkan kondisi tahun 2017 sampai dengan 2019, Persentase lembaga kemasyarakatan yang berprestasi 40, 45 dan 46 sedangkan pada tahun 2020 ini target yang ditetapkan sebesar 47% terealisasi 47%. Capaian kinerja sasaran tahun 2020 masuk kategori sangat tinggi dengan capaian indikatornya sebesar 100%.

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, capaian kinerja sasaran ini mengalami kenaikan terus. Sedangkan bila dibandingkan dengan target jangka menengah yang sebesar 49%, maka capaian kinerja sasaran ini masih perlu ditingkatkan. Langkah –langkah untuk mencapai target jangka

menengah masih perlu dilaksanakannya pembinaan dan monitoring lembaga kemasyarakatan.

Untuk persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat kondisi pada tahun 2017 sampai dengan 2019 sebesar 100% begitu juga pada tahun 2020 terealisasi 100% dari yang ditargetkan sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan tahun –tahun sebelumnya maka capaian kinerja sasaran ini tahun 2020 sama dengan setahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena bantuan sosial yang ada tersalur sepenuhnya, Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah maka capaian kinerja sasaran ini tahun 2020 sudah mencapai target. Walaupun begitu masih perlu dilakukannya pengawasan, evaluasi yang diperlukan agar bantuan social tersalur sepenuhnya dengan sesuai sasaran.

Pada tahun 2017 sampai 2019 persentase usulan masyarakat yang masuk dalam APBD Kabupaten 6%, 7 %, 20% sedangkan pada tahun 2020 ini target yang ditetapkan sebesar 9 % terealisasi 0%. Capaian kinerja sasaran tahun 2020 masuk kategori sangat rendah dengan capaian indikatornya sebesar 0%. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, capaian kinerja sasaran ini pada tahun 2020 mengalami penurunan drastis. Hal ini terjadi karena adanya kebijakan reconfusing anggaran untuk kegiatan penanggulangan Covid-19.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, capaian kinerja sasaran ini perlu ditingkatkan sehingga semua atau sebagian besar usulan musrenbang kecamatan yang disetujui di musrenbang kabupaten bisa terealisasi di APBD dinas/badan/kantor yang membidangi.

3.2.4. Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan

Peningkatan peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan tercermin pada 1 (satu) capaian indikator kinerja yaitu Persentase lembaga kemasyarakatan aktif.

Tabel 3.9

Capaian Kinerja Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan

INDIKATOR KINERJA	T	R	CAPAIAN
Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	73%	71%	97%

Uraian Kinerja

Capaian indikator persentase lembaga kemasyarakatan aktif pada tahun 2020 sebesar 71%. Indikator persentase lembaga kemasyarakatan aktif dihitung dari jumlah lembaga kemasyarakatan aktif dibagi dengan jumlah lembaga kemasyarakatan yang ada kali 100%. Untuk tahun 2020 jumlah lembaga kemasyarakatan aktif sejumlah 410 dari jumlah lembaga kemasyarakatan yang ada sebanyak 576. Lembaga kemasyarakatan ini terdiri dari Rt, RW, Posyandu, karang taruna, LPMD dan PKK dari 29 desa. Jadi kalau diprosentase maka capaian indikator kinerja sebesar 97% dari yang ditargetkan sebesar 73%. Capaian indikator kinerja ini masuk kategori sangat tinggi.

Evaluasi dan Analisis Kinerja

Tabel 3.10

Perbandingan Data Persentase lembaga kemasyarakatan aktif

INDIKATOR KINERJA	2017	2018	2019	2020
Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	59	63,36	66,84	71

Berdasarkan kondisi tahun 2017 sampai tahun 2019, Persentase lembaga kemasyarakatan aktif 59% ,63,36%, 66,84% sedangkan pada tahun 2020 ini target yang ditetapkan sebesar 73% terealisasi 71%. Capaian kinerja sasaran tahun 2020 masuk kategori sangat tinggi dengan capaian indikatornya sebesar 97%.

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya capaian kinerja sasaran ini mengalami kenaikan terus. Bila dibandingkan dengan jangka menengah yang ditargetkan sebesar 80%, maka capaian indikator kinerja ini masih perlu ditingkatkan. Langkah-langkah yang diperlukan agar dapai mencapai target jangka menengah yaitu memotivasi/mendorong lembaga kemasyarakatan agar lebih produktif.

3.2.5. Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat

Pelaksanaan penyaluran bantuan kepada masyarakat tercermin pada 1 (satu) capaian indikator kinerja yaitu Persentase persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.

Tabel 3.11

Capaian Kinerja Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat

INDIKATOR KINERJA	T	R	CAPAIAN
Persentase persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan	100	100	100

Uraian Kinerja

Untuk tahun 2020 capaian indikator persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan mencapai 100%. Indikator persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan dihitung dari jumlah yang menerima bantuan (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dibagi dengan jumlah penerima keseluruhan dalam daftar kali 100%. Untuk tahun 2020 jumlah yang menerima bantuan (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) sejumlah 7.862 dari penerima keseluruhan dalam daftar sebanyak 7.862. Jumlah penerima bantuan BPNT sebanyak 4.801 orang, jumlah penerima bantuan PKH sebanyak 2.680 orang jumlah penerima bantuan keagamaan sebanyak 381 tempat ibadah. Jadi kalau diprosentase maka capaian indikator kinerja sebesar 100% dari yang ditargetkan sebesar 100%.

Evaluasi dan Analisis Kinerja

Tabel 3.12

Perbandingan Data Persentase persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan

INDIKATOR KINERJA	2017	2018	2019	2020
Persentase persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan	100	100	100	100

Berdasarkan kondisi tahun 2017 sampai dengan 2019 capaian indikator Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan mencapai 100%, demikian juga pada tahun 2020 ini terealisasi 100% dari yang ditargetkan sebesar 100%. Capaian kinerja sasaran tahun 2020 sangat tinggi dengan capaian indikatornya sebesar 100%.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, realisasi capaian indikator ini sudah mencapai target yaitu 100%. Namun demikian masih diperlukan pengawasan dan monitoring secara berkala agar penyaluran bantuan tepat waktu dan sesuai dengan sasaran.

3.2.6. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan

Peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan tercermin pada 1 (satu) capaian indikator kinerja yaitu Persentase usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten.

Tabel 3.13

Capaian Kinerja Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan

INDIKATOR KINERJA	T	R	CAPAIAN
Persentase usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten	46%	53,84%	117%

Uraian Kinerja

Capaian indikator persentase usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten pada tahun 2020 sebesar 117%. Indikator persentase usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten dihitung dari jumlah usulan masyarakat (usulan kecamatan) yang terealisasi dalam RKPD dibagi dengan jumlah usulan masyarakat (usulan kecamatan) kali 100%. Untuk tahun 2020 jumlah usulan masyarakat (usulan kecamatan) yang terealisasi dalam RKPD sejumlah 21 dari jumlah jumlah usulan masyarakat (usulan kecamatan) sejumlah 39. Jadi kalau diprosentase maka capain indikator kinerja sebesar 53,84% dari yang ditargetkan sebesar 46%. Capaian indikator kinerja ini melebihi target yang telah ditetapkan.

Evaluasi dan Analisis Kinerja

Tabel 3.14

Perbandingan Data Persentase usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten

INDIKATOR KINERJA	2017	2018	2019	2020
Persentase usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten	40	100	100	53,84

Berdasarkan kondisi tahun 2017 sampai dengan 2019, Persentase usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten 40%,100%,100% sedangkan pada tahun 2020 ini target yang ditetapkan sebesar 44% terealisasi 53,84%. Capaian kinerja sasaran tahun 2020 sangat tinggi dengan capaian indikatornya sebesar 117%.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, capaian indikator 2020 yang sebesar 53,83% ini sudah mencapai target jangka menengah yaitu 50%. Walaupun begitu untuk tahun berikutnya masih diperlukan langkah-langkah agar desa mengajukan usulan anggaran yang berpotensi untuk lolos di Musrenbang kabupaten.

Untuk mencapai 4 (empat) tujuan yaitu Meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui upaya pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan, meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan, terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan ditunjang oleh 3 (Tiga) program yaitu Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan dengan anggaran Rp.74.020.000, atau 33% dari anggaran langsung untuk program

prioritas. Untuk program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan tahun 2020 ada perubahan anggaran karena kebijakan reconfusing anggaran untuk penanggulangan covid-19, anggaran berkurang menjadi sebesar Rp.43.657.500,- dan terealisasi sebesar Rp.43.617.500,- (99,91%) terdapat efisiensi sebesar Rp.40.000,-

Program kedua yang mendukung yaitu Program perencanaan pembangunan daerah dengan anggaran Rp.15.343.000,- atau 7% dari anggaran langsung untuk program prioritas dan terealisasi sebesar Rp. 15.338.000,- atau 99,97% efisiensi sebesar Rp.5.000,- dan program yang ketiga adalah Program Penanggulangan kemiskinan masyarakat desa dengan anggaran sebesar Rp.9.903.400,- atau 4% dari anggaran langsung untuk program prioritas. Pada tahun 2020 ada penambahan anggaran sebesar Rp.140.200, anggaran menjadi Rp.10.043.600,- dan terealisasi sebesar Rp.10.033.6400,- Dengan capaian kinerja 0% sampai dengan 100% dan penggunaan anggaran dinilai efisien karena dari anggaran Rp. 69.044,100,- terealisasi Rp.68.989.100,-. atau terserap 99,92%, efisiensi sebesar Rp.55.000,-

3.2.7. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan mengedepankan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah kecamatan

Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan mengedepankan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah kecamatan tercermin pada 2 (dua) capaian indikator kinerja yaitu Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan dan Persentase Realisasi Capaian RKPDes

Tabel 3.15

Capaian Kinerja Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan mengedepankan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah kecamatan

INDIKATOR KINERJA ¹	T	R	CAPAIAN
Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan	3,3	3,24	98,18%
Persentase Realisasi Capaian RKPDes	100%	100%	100%

Uraian Kinerja

Capaian indikator Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan pada tahun 2020 sebesar 3,24. Indikator Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan dihitung dari data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Untuk tahun 2020 data hasil survey kepuasan masyarakat sejumlah 3,24. Jadi kalau dihitung maka capaian indikator kinerja sebesar 3,24 dari yang ditargetkan sebesar 3,3. Capaian indikator kinerja ini kurang dari target yang telah ditetapkan karena itu perlu adanya peningkatan kinerja ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Capaian indikator persentase Realisasi Capaian RKPDes pada tahun 2020 sebesar 100%. Indikator persentase Realisasi Capaian RKPDes dihitung dari jumlah dokumen RKPDes yang tersusun dibagi jumlah desa se kecamatan Juwana kali 100%. Untuk tahun 2020 jumlah dokumen RKPDes yang tersusun sejumlah 29 dari jumlah desa se kecamatan Juwana sejumlah 29 desa. Jadi kalau diprosentase maka capaian indikator kinerja sebesar 100% dari yang ditargetkan sebesar 100%. Capaian indikator kinerja ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Evaluasi dan Analisis Kinerja

Tabel 3.16

Perbandingan Data Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan dan Persentase Realisasi Capaian RKPDes

INDIKATOR KINERJA	2017	2018	2019	2020
Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan	3	3,19	3,20	3,24
Persentase Realisasi Capaian RKPDes	100	100	100	100

Berdasarkan kondisi tahun 2017 sampai dengan 2019, Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan nilainya 3, 3,19, 3,20 sedangkan pada tahun 2020 ini target yang ditetapkan sebesar 3,3 terealisasi 3,24. Jika dibandingkan dengan tahun 2017, 2018, 2019 indik kepuasan masyarakat 2020 mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan adanya perbaikan/peningkatan kinerja ASN terhadap

pelayanan terhadap masyarakat. Capaian kinerja sasaran tahun 2020 sangat tinggi dengan capaian indikatornya sebesar 98,18%.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang sebesar 3,4 maka capaian kinerja 2020 yang terealisasi 3,24 masih perlu ditingkatkan. Adapun langkah langkah yang ditempuh agar realisasi capaian kinerja mendekati target menengah adalah Kecamatan Juwana masih perlu meningkatkan mutu pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Berdasarkan kondisi 2017 sampai dengan 2019 Persentase Realisasi Capaian RKPDes 100%, 100% dan 100% begitu juga pada tahun 2020 target yang ditetapkan sebesar 100% terealisasi 100% dengan capaian indikatornya sebesar 100% yang mana ini termasuk kategori sangat tinggi. Hal ini berarti semua desa melaksanakan kewajibannya untuk menyusun dokumen RKPDes sebagai syarat tertibnya administrasi walaupun kadang masih ada desa yang terlambat dalam penyusunan dokumen RKPDes.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang 100%, maka realisasi capaian kinerja ini tahun 2020 sudah memenuhi target. Walaupun begitu kita tetap melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi agar desa selalu melaksanakan kewajiban menyusun RKPDes sesuai standart dan tepat waktu.

3.2.8. Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan dan administrasi kependudukan di kecamatan

Peningkatan kualitas pelayanan perijinan dan administrasi kependudukan di kecamatan tercermin pada 2 (dua) capaian indikator kinerja yaitu Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu dan Persentase pelayanan perijinan tepat waktu.

Tabel 3.17

Capaian Kinerja Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan dan administrasi kependudukan di kecamatan

INDIKATOR KINERJA ¹	T	R	CAPAIAN
Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	100	100	100
Persentase pelayanan perijinan tepat waktu	100	100	100

Uraian Kinerja

Capaian indikator persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu pada tahun 2020 sebesar 100%. Indikator persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu dihitung dari jumlah pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu dibagi jumlah pelayanan administrasi kependudukan keseluruhan kali 100%. Jumlah pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu sebesar 8.797 sedangkan jumlah pelayanan administrasi kependudukan keseluruhan sebesar 8.797. Jadi kalau diprosentase maka capaian indikator kinerja sebesar 100% dari yang ditargetkan sebesar 100%. Capaian indikator kinerja ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Capaian indikator persentase pelayanan perijinan tepat waktu pada tahun 2020 sebesar 100%. Indikator persentase pelayanan perijinan tepat waktu dihitung dari jumlah pelayanan perijinan tepat waktu dibagi jumlah pelayanan perijinan keseluruhan kali 100%. Jumlah pelayanan perijinan tepat waktu sebesar 1.432 sedangkan jumlah pelayanan perijinan sebesar 1.432. Jadi kalau diprosentase maka capaian indikator kinerja sebesar 100% dari yang ditargetkan sebesar 100%. Capaian indikator kinerja ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Evaluasi dan Analisis Kinerja

Tabel 3.18

Perbandingan Data Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu dan Persentase pelayanan perijinan tepat waktu

INDIKATOR KINERJA	2017	2018	2019	2020
Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	100	100	100	100
Persentase pelayanan perijinan tepat waktu	100	100	100	100

Berdasarkan kondisi tahun 2017 sampai dengan 2019, Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu sebesar 100% sedangkan pada tahun 2020 ini target yang ditetapkan sebesar 100% terealisasi 100%. Capaian kinerja sasaran tahun 2020 termasuk kategori sangat tinggi dengan capaian indikatornya sebesar 100%.

Berdasarkan kondisi 2017 sampai 2019 Persentase pelayanan perijinan tepat waktu 100% sedangkan pada tahun 2020 ini target yang ditetapkan sebesar 100% terealisasi 100% dengan capaian indikatornya sebesar 100%. Hal ini

menunjukkan bahwa kecamatan Juwana konsisten dalam pemberian pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang sebesar 100%, capaian indikator tahun 2020 sudah memenuhi target. Dengan kondisi seperti ini Kecamatan Juwana tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sepenuh hati, cepat dan tepat waktu.

3.2.9. Terpenuhinya kebutuhan data untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

Pemenuhan kebutuhan data untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tercermin pada 1 (satu) capaian indikator kinerja yaitu Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan

Tabel 3.19

Capaian Kinerja Terpenuhinya kebutuhan data untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

INDIKATOR KINERJA ¹	T	R	CAPAIAN
Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan	85%	72,5%	85%

Uraian Kinerja

Capaian indikator persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan pada tahun 2020 sebesar 85%. Indikator persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan dihitung dari jumlah data monografi dan profil kecamatan yang terisi dibagi jumlah seluruh data monografi dan profil kecamatan kali 100%. Jumlah data monografi dan profil kecamatan sejumlah 40 dan 19 sedangkan jumlah seluruh data monografi dan profil kecamatan sejumlah 50 dan 29. Jadi kalau diprosentase maka capaian indikator kinerja sebesar 72,5% dari yang ditargetkan sebesar 85%.

Evaluasi dan Analisis Kinerja

Tabel 3.20

Perbandingan Data persentase monografi dan profil kecamatan keterisian data

INDIKATOR KINERJA	2017	2018	2019	2020
Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan	50	64	69,04	72,5

Berdasarkan kondisi tahun 2017 sampai 2019, Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan sebesar 50%, 64% dan 69,04%, sedangkan pada tahun 2020 ini target yang ditetapkan sebesar 85% terealisasi 72,5%. Capaian kinerja sasaran tahun 2020 tinggi dengan capaian indikatornya sebesar 85%. Jika dilihat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, maka persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan mengalami kenaikan walaupun belum mencapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang sebesar 95%, maka realisasi capaian kinerja 2020 yang sebesar 72,5% masih perlu ditingkatkan karena belum mencapai target. Untuk mencapai target jangka menengah maka diperlukan langkah-langkah pembinaan dan pendampingan ke desa –desa agar tertib administrasi sehingga data yang diperlukan sewaktu-waktu tersedia.

3.2.10. Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa

Untuk mewujudkan tertib administrasi pelaporan keuangan desa tercermin pada 1 (satu) capaian indikator kinerja yaitu Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib.

Tabel 3.21

Capaian Kinerja Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa

INDIKATOR KINERJA	T	R	CAPAIAN
Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib	87%	86%	99%

Uraian Kinerja

Capaian indikator persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib pada tahun 2020 sebesar 99%. Indikator persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib dihitung dari jumlah desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib dibagi jumlah semua desa

kali 100%. Jumlah desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib sejumlah 25 sedangkan jumlah semua desa sejumlah 29. Jadi kalau diprosentase maka capain indikator kinerja sebesar 86% dari yang ditargetkan sebesar 87%. Capaian indikator kinerja ini kurang dari target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan jumlah desa yang administrasi pengelolaan yang tertib tetap tidak mengalami penambahan pada tahun 2020.

Evaluasi dan Analisis Kinerja

Tabel 3.22

Perbandingan Data Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib

INDIKATOR KINERJA	2017	2018	2019	2020
Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib	80	80	86	86

Berdasarkan kondisi tahun 2017 sampai 2019, Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib sebesar 80%, 80%, dan 86% sedangkan pada tahun 2020 ini target yang ditetapkan sebesar 87% terealisasi 86%. Capaian kinerja sasaran tahun 2020 masuk kategori sangat tinggi dengan capaian indikatornya sebesar 99%.

Untuk mencapai 4 (empat) tujuan yaitu Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan mengedepankan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah kecamatan, meningkatnya kualitas pelayanan perijinan dan administrasi kependudukan di kecamatan, terpenuhinya kebutuhan data untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta tujuan terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa ditunjang oleh 4 (empat) program yaitu Program peningkatan kualitas pelayanan perijinan dan pelayanan publik dengan anggaran Rp.16.998.300,- Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan anggaran Rp.35.969.000,- Program Pengembangan Data dan Informasi dengan anggaran Rp.7.964.000,- dan Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dengan anggaran Rp.30.431.500,- .

Perlu kami sampaikan bahwa untuk kondisi tahun 2020 ini anggaran ada yang mengalami pengurangan dan penambahan karena adanya kebijakan refofusing dan adanya penerimaan pengembalian insentif pelunasan pajak. Untuk anggaran Program peningkatan Pelayanan Perizinan Pelayanan Publik

berkurang menjadi Rp.10.717.300 terealisasi sebesar Rp.10.709.800 atau 99,93% efisiensi sebesar Rp. 7.500,- Untuk anggaran Program Pengembangan Data dan Informasi berkurang menjadi sebesar Rp.3.907.000 terealisasi sebesar Rp.3.897.000 atau 99,74% efisiensi sebesar Rp.10.000,- Untuk anggaran Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa bertambah menjadi Rp.46.939.000 terealisasi Rp.45.524.000 atau 96,99% efisiensi sebesar Rp.1.415.000,- Untuk anggaran Program Penataan Administrasi Kependudukan tetap sejumlah Rp. 35.969.000 dan terealisasi Rp.34.489.000,- atau 97,29% Jadi total anggaran program untuk mendukung tujuan ini adalah sebesar Rp.97.012.300,- atau sebesar 49,97% dari anggaran prioritas utama.

3.3 REALISASI ANGGARAN

Setelah APBD Perubahan total anggaran belanja berubah menjadi Rp.3.266.699.000,- dengan perincian belanja tidak langsung Rp.2.499.325.000,- dan belanja langsung sebesar Rp.767.374.000,-

Tabel 3.23

Anggaran Belanja Daerah Perubahan

URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN	%
Belanja Tidak langsung	2.499.325.000,-	76,51
Belanja Langsung	767.374.000,-	23,49
Total Belanja	3.266.699.000,-	100

Terdapat pengurangan anggaran belanja sebesar Rp.54.740.000,- atau sebesar 6,66% dari anggaran APBD sebelum perubahan. Pengurangan anggaran belanja ini berpengaruh pada jumlah anggaran yang digunakan untuk pencapaian sasaran, karena perubahan anggaran ini sebagian digunakan untuk menunjang kegiatan prioritas.

Total realisasi belanja 2020 sebesar Rp.2.909.495.748,- dengan perincian belanja tidak langsung sebesar Rp.2.152.476.680,- dan belanja langsung sebesar Rp.757.019.068,-

Belanja langsung yang utama untuk program-program prioritas sebesar Rp.194.134.400,-. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terserap rata-rata 99,21%. Sasaran Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah Kecamatan dan Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban menyerap anggaran tertinggi belanja prioritas (99,96%). Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran ketujuh sampai sasaran kesepuluh (97,53%).

Anggaran belanja yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut :

Tabel. 3.24
Realisasi Anggaran Belanja Prioritas (dalam rupiah) Tahun 2020

NO	SASARAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%
1	Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah Kecamatan	34.875.000	28.078.000	28.068.000,-	99,96
2	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban				
3	Meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui upaya pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan	99.266.400	69.044.100	68.989.100,-	99,92
4	Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan				
5	Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat	-	-		
6..	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan				
7.	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan mengedepankan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah kecamatan	91.326.800	97.012.300	94.619.800	97,53
8.	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan dan administrasi kependudukan di kecamatan				

9..	Terpenuhinya kebutuhan data untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan				
10.	Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa				
	TOTAL	225.504.200,-	194.134.400,-	191.676.900	
	Rata-rata realisasi				99,13
	Realisasi tertinggi				99,96
	Realisasi terendah				97,53

BAB IV PENUTUP

Laporan Kineja Instansi Pemerintah Kecamatan Juwana-Kabupaten Pati tahun 2020 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah dalam rangka mencapai sasaran dengan target indikator yang telah ditetapkan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pati 2020 merujuk pada Rencana Strategis Kecamatan Juwana 2017 – 2022 dalam mengelola kepercayaan masyarakat kabupaten.

Bila dilihat pengukuran indikator yang digunakan dalam menilai kinerja Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, indikator tercapai dengan kriteria tinggi, tebanyak sangat tinggi, meski serapan anggaran tidak mencapai 100%. Hal ini menunjukkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Sakip sebagai sistem diharapkan dapat memberikan sarana bagi pengampu kepentingan dalam mempertahankan kinerjanya.

Secara umum hal yang dapat dilakukan dalam rangka mempertahankan kinerja yang sangat tinggi ini, Kecamatan Juwana dalam kedepan dapat melaksanakan hal sebagai berikut:

- a. Menerapkan budaya kerja pada setiap jenjang manajerial dan melakukan review kinerja secara berkala:
- b. Meningkatkan kualitas kinerja untuk mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra dengan didukung oleh program dan kegiatan Kecamatan Juwana:
- c. Mengembangkan sistem manajemen kinerja secara terintegrasi, mulai dari perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja:
- d. Meningkatkan kualitas evaluasi internal sehingga hasil evaluasi dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan pencapaian kinerja organisasi dan efektifitas penggunaan anggaran:
- e. Meningkatkan kualitas basis data sehingga proses perencanaan maupun evaluasi program kegiatan maupun kinerja lebih akurat dan berhasil guna.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Juwana tahun 2020 ini diharapkan bermanfaat bagi seluruh Stakeholder, dalam upaya akuntabilitas dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akan memberikan dampak lebih luas pada kemajuan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, dengan penyempurnaan perencanaan pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Juwana, Februari 2021



CAMAT JUWANA

Drs. SUGIYONO, MM

Pembina Tk. I

TNIP. 19760303 199310 1 001



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Drs. SUGIYONO, M.M

Jabatan : Camat Juwana

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HARYANTO, S.H, M.M,M.Si

Jabatan : Bupati Pati

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Bupati Pati

HARYANTO, S.H, M.M, M.Si

Pati, 18 Januari 2020

Pihak Pertama,
Camat Juwana

Drs. SUGIYONO, M.M

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KECAMATAN JUWANA KABUPATEN PATI**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET
1.	Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah Kecamatan	Angka Kriminalitas	3
2.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	Persentase pos kamling aktif	37%
3.		Persentase anggota linmas aktif	98%
4.	Meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui upaya pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berprestasi	47%
5.		Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat	100%
6.		Persentase usulan masyarakat yang masuk dalam APBD Kabupaten	9%
7.	Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	73%
8.	Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat	Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.	100%
9.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persentase usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten	46%

10	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan mengedepankan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan	3,3
11		Persentase Realisasi Capaian RKPDes	100%
12	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan dan administrasi kependudukan di kecamatan	Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	100%
13		Persentase pelayanan perijinan tepat waktu	100%
14	Terpenuhinya kebutuhan data untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan	85%
15	Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa	Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib	87%

	PROGRAM		ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rp.	35.969.000	APBD KAB
2	Program Pengembangan Data/Informasi	Rp.	7.964.000	APBD KAB
3	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Rp.	74.020.000	APBD KAB
4	Program Pemeliharaan Kantrantibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Rp.	34.875.000	APBD KAB
5	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp.	30.431.500	APBD KAB
6	Program Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Desa	Rp.	9.903.400	APBD KAB

	PROGRAM		ANGGARAN	KETERANGAN
7	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp.	15.343.000	APBD KAB
8	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan dan Pelayanan Publik	Rp.	16.998.300	APBD KAB
	Jumlah	Rp.	225.504.200	

Pihak Kedua,
Bupati Pati



HARYANTO, S.H, M.M, M.Si

Pati, 18 Januari 2020

Pihak Pertama,
Camat Juwana



Drs. SUGIYONO, M.M